

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR            TAHUN 2015  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS

---

LAMBANG  
DAERAH

KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

---

**SURAT PERINTAH TUGAS**

**NOMOR :**

Dasar : .....

.....

**MEMERINTAHKAN :**

Kepada : 1. Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

: 2. Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 1. ....  
2. ....  
3. ....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Pejabat yang berwenang

( N A M A )  
NIP

---

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

  
H. M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR      TAHUN 2015  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS

---

LAMBANG  
DAERAH

KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

---

Lembar ke : 1, 2  
Kode No. :  
Nomor :

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS  
(SPPD)**

---

1. Pejabat yang memberi perintah	
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebatan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan Lain-lain	

Dikeluarkan di :  
pada tanggal :

Pejabat yang berwenang

( N A M A )  
NIP

---

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

SPPD No. :  
Berangkat dari :  
Pada tanggal :  
Ke :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( N A M A )

---

II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
---	--

---

III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
--	--

---

IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
---	--

---

V. Tiba kembali di : Pada tanggal :	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya.
--	---

Pejabat yang berwenang

( N A M A )  
NIP

---

#### VI. CATATAN LAIN-LAIN

---

#### VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
 NOMOR TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPPD Nomor :  
 Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
JUMLAH : Terbilang		Rp	

..... tanggal, bulan, tahun  
 Telah dibayar sejumlah Rp .....  
 Telah menerima jumlah uang sebesar Rp .....

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

( ..... )  
 NIP

( ..... )  
 NIP

**PERHITUNGAN SPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah : Rp .....  
 Yang telah dibayar semula : Rp .....  
 Sisa kurang/lebih : Rp .....

Pejabat Yang Berwenang

( \_\_\_\_\_ )  
 NIP

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR TAHUN 2015  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS

**DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor ..... Tanggal ....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
		Jumlah

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dilakukan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui:  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

....., tanggal, bulan, tahun  
Pelaksana SPPD,

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

  
H. M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN V  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR TAHUN 2015  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS

**FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPPD**

NO	URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS	LAINNYA
1	2	4	5	6	7
1	Pejabat Negara/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah	Bisnis	VIP / Kelas I A	Spesial / Eksekutif	riil cost
2	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif	riil cost
4	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	riil cost
5	Pejabat Eselon IV/Golongan III/Tokoh Masyarakat	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	riil cost
6	Golongan II/Golongan I/Pegawai Tidak Tetap dan Anggota Masyarakat	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	riil cost

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN VI  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR TAHUN 2015  
TANTANG  
PERJALANAN DINAS

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN/PENUNDAAN TUGAS PERJALANAN DINAS**  
NOMOR .....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ..... (1)  
NIP : ..... (2)  
Jabatan : ..... (3)  
Unit Kerja : ..... (4)  
SKPD : ..... (5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama :

Nama : ..... (6)  
NIP : ..... (7)  
Jabatan : ..... (8)  
Unit Kerja : ..... (9)  
SKPD : ..... (10)

Pembatalan/penundaan perjalanan dinas dilakukan dalam keadaan darurat/  
perintah Gubernur/ perintah pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPPD yaitu  
.....(11).....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat  
digantikan oleh Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian  
hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan  
bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....(12)  
Yang Membuat Pernyataan

.....(13)

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

  
H. M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN VII  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR TAHUN 2015  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN  
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ..... (1)  
NIP : ..... (2)  
Jabatan : ..... (3)  
Unit Kerja : ..... (4)  
SKPD : ..... (5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: ..... tanggal ..... dan SPPD Nomor ..... tanggal ..... atas nama:

Nama : ..... (6)  
NIP : ..... (7)  
Jabatan : ..... (8)  
Unit Kerja : ..... (9)  
SKPD : ..... (10)

Dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor ..... tanggal .....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa .....(11).... dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA-SKPD tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp. .....(12)...., sehingga dibebankan pada DPA-SKPD Nomor: ..... tanggal ..... Unit Kerja .....(13)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Daerah tersebut ke Kas Daerah.

.....(14)

Yang Membuat Pernyataan

.....(15)

---

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI